



## Perilaku Destruktif Dalam Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Demokratisasi Mesir dan Suriah (Destructive Behavior in US Double Standard Politics Against the Democratization of Egypt and Syria)

Yogi Fery Hidayat  
Universitas Gadjah Mada  
Email: [yferyhidayat@gmail.com](mailto:yferyhidayat@gmail.com)

*Abstract: Hypocrisy is a trait that is very hated in Islam and is a disgraceful trait for its adherents. Hypocrisy is a trait possessed by the enemies of Islam who want to destroy the glory of Islam from within, even trying to destroy Islamic countries, especially those in the Middle East, where Islam first appeared and spread widely among Arabs. This paper aims to find out the practice of hypocritical behavior that occurs at the country level by using a qualitative method that focuses on a literature approach, That is by collecting data obtained from various references in the form of articles, journals, books and research related to material objects and formal objects which are then analyzed using the conspiracy theory of Robert O Zelency (1987). The result of this research is the double standard political success played by the United States who wants to control the oil fields in Egypt and Syria under the guise of calling for democratization in the government system. America acts as a friend to Egypt in the process of transitioning from authoritarian power to democracy and has been very active in guarding the decline of Hosni Mubarak from his leadership, while in Syria, America has supported opposition groups to overthrow a legitimate government that is considered to be running the government in a dictatorial way. America also provided assistance to opposition groups in the form of weapons to expedite the process of overthrowing Bashar Al-Assad from power. America's double-standard politics towards Egypt and Syria is a project undertaken to realize a larger agenda in the geopolitical national political arena.*

*Keywords: double standard politics; democratization; hypocrisy; Egyptian and Syrian revolutions.*

### PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah merupakan suatu wilayah yang sarat akan sumber daya alam, terutama sumber daya minyaknya yang sangat melimpah (Brooks & Kurtz, 2016), yang menjanjikan kesejahteraan bagi penduduk dunia secara ekonomi. Hal ini menjadikan negara-negara yang berada di Timur Tengah menjadi lahan perebutan pengaruh di antara negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara Barat untuk memenuhi kepentingannya sehingga menjadikan kawasan ini rawan akan konflik (Sahide, 2019).

Amerika Serikat adalah negara yang sangat berkepentingan di Timur Tengah (Sahide, 2019). Dengan segala macam cara Amerika Serikat berusaha menancapkan pengaruhnya untuk menaklukkan negara-negara Timur Tengah. Untuk mewujudkan keinginannya, Amerika Serikat memulai “proyeknya” di kawasan ini yaitu mengusung sistem pemerintahan yang demokratis dan mendorong negara-negara Timur Tengah untuk mengadakan reformasi pemerintahan yang otoriter menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis (House & Republican, 2011).

Demokrasi yang ditawarkan oleh Asing terutama Amerika Serikat menjanjikan kebebasan dalam menentukan jalan hidup sebagai manusia yang merdeka, membantu rakyat keluar dari tekanan rezim otoriter, menegakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan mengancam dengan keras bagi penguasa yang melakukan kekerasan dalam menghadapi rakyatnya yang kritis terhadap kekuasaan (Sahide, 2019).

Dengan adanya janji demokrasi yang akan membawa kehidupan rakyat menjadi lebih baik, rakyat mulai mengadakan perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap otoriter yang sudah memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Dimulai dengan pergolakan politik yang terjadi di Tunisia, memaksa presiden Tunisia Ben Ali mundur dari jabatannya diakibatkan dari munculnya *Jasmine Revolution* atau yang dikenal dengan Revolusi Melati (Tamburaka, 2011).

Keberhasilan Revolusi Tunisia kemudian menjalar dengan cepat ke negara-negara yang berada di Afrika Utara dan Timur Tengah (Angrist, 2013), termasuk di dalamnya Mesir dan Suriah yang terkena efek domino dari penggulingan presiden Ben Ali dari tampuk kekuasaannya.

Mesir di bawah kekuasaan Husni Mubarak merupakan mitra setia bagi Amerika Serikat. Begitu pula Amerika Serikat, untuk melindungi kepentingannya dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina menganggap Mesir adalah negara sekutu yang sangat penting di Timur Tengah. Bantuan dari Amerika Serikat baik berupa bantuan militer ataupun bantuan pembangunan terus mengalir setiap tahunnya ke negara Mesir. Karena kedekatan Mesir dengan Amerika Serikat inilah yang menjadikan Husni Mubarak sering kali membuat kebijakan politik yang tidak populer dikalangan rakyatnya, misalnya saja kerjasama Israel-Mesir yang memaksakan blokade di jalur Gaza (Tamburaka, 2011).

Berbeda dengan Mesir, Suriah adalah negara yang anti-Amerika Serikat. Suriah, bersama Iran, Gerakan Hizbullah, Gerakan Hamas, Ikhwanul Muslimin dan Tanzim Al-Qaeda mengusung misi independensi Timur Tengah yang terlepas dari intervensi Asing dan bernapaskan Islam (Rahman, 2007). Karena Suriah berada di antara yang anti-Amerika, maka Amerika pun menuduh Suriah telah memberi dukungan terhadap terorisme, melakukan pendudukan atas wilayah Libanon dan mengembangkan senjata pemusnah masal, dan selanjutnya Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada Suriah. Hubungan bilateral Suriah dan Amerika Serikat diwarnai kebencian dan dendam (Darraj, 2005).

Berkenaan dengan pembahasan politik standar ganda Amerika Serikat, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya penelitian (Setiawan, 2015) yang berjudul "*Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*". Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkap penyebab Amerika Serikat melakukan politik standar ganda karena adanya dilema diplomatik yang dialami Amerika Serikat baik secara eksternal maupun internal yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya mengenai Mesir.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyudi (2016) dalam tesisnya yang berjudul "*Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kudeta Mesir 2013*". Hasil dari

penelitian ini menyebutkan bahwa Politik Standar Ganda yang dilakukan Amerika Serikat dipengaruhi oleh kemenangan Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai ganjalan yang bisa menjegal kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga respon kroni Amerika Serikat di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Israel dan Uni Emirat Arab yang menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang mengancam stabilitas keamanan Timur Tengah.

Dalam penelitian (Andiko, 2018) yang berjudul “Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam” menyebutkan bahwa Negara Barat termasuk Amerika Serikat sering kali menerapkan standar ganda dalam menjalankan demokrasi yang diusungnya, hal ini tercermin dari sikap demokratis di negaranya, namun tidak demokratis untuk negara lain dalam kebijakan luar negerinya.

Tina Herawati Sitorus (2018) menuangkan pemikirannya dalam Skripsinya yang berjudul “Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik Suriah 2011-2013”, hasil dari penelitiannya adalah Amerika Serikat telah berhasil menyebarkan ideologi demokrasi ke negara Suriah dan mendapatkan keuntungan dalam menciptakan hegemoni dan kepentingan luar negerinya yaitu mendominasi dan mengelola sumber daya alam Suriah.

Sementara dalam penelitian ini, penulis mencoba mengungkap perilaku destruktif yang ada dibalik politik standar ganda Amerika Serikat dengan “berkedok” demokratisasi terhadap sistem pemerintahan Mesir dan Suriah. Dalam proses demokratisasi Mesir, Amerika Serikat hadir sebagai kawan dalam penurunan Husni Mubarak dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah. Namun ketika proses demokratisasi Suriah, Amerika justru mendukung oposisi dan memberikan pasokan senjata bagi para penentang Bashar Al-Assad.

## **METODE**

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan oleh Penulis dalam tulisan ini, yaitu suatu metode penelitian terkait dengan sifat, ciri, ideologi, keadaan dan kondisi. Dalam penelitian kualitatif, data-data penting yang dibutuhkan untuk suatu penelitian dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku, majalah ilmiah dan arsip (Sahide, 2019). Penulis mengkaji tentang perilaku destruktif yang terjadi pada fenomena revolusi Mesir dan Suriah dengan “berkedok” agenda demokratisasi sistem pemerintahan yang diusung oleh Amerika Serikat dan membaca kepentingan Amerika Serikat secara geopolitik yang menerapkan politik standar ganda dalam proses demokratisasi Mesir dan Suriah dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data. Pengumpulan data pada penelitian ini fokus pada kajian pustaka yang bersifat tertulis baik yang bersumber dari referensi yang berupa buku atau jurnal maupun memanfaatkan layanan internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data

merupakan suatu proses yang dikerjakan dengan tujuan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorisasikannya untuk menemukan tema dan hipotesis kerja sesuai dengan data yang diperoleh (Moleong, 2010). Penulis melakukan reduksi data untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan mengadakan penggolongan atau pengkategorisasian dari keterangan-keterangan yang dianggap penting. Tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan tentang keabsahan seluruh data yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif dengan menggunakan teori konspirasi Robert O Zelency (Reid, 2022; Sampoerna University, 2022).

## PEMBAHASAN

Mengenai teori konspirasi, Robert O Zelency (Reid, 2022) mengatakan bahwa konspirasi adalah suatu tindakan yang disusun dengan rencana yang matang dan bersifat rahasia yang bertujuan untuk melakukan tindakan pengrusakan dengan cara yang ilegal (Reid, 2022). suatu tindakan yang dilakukan untuk mengadakan penghancuran atau pengrusakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinamakan destruktif.

Menurut (Douglas et al., 2019), ada beberapa konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya teori konspirasi, diantaranya yaitu:

1. Masyarakat dapat mendesak adanya transparansi dalam sebuah sistem pemerintahan
2. Adanya prasangka dan dugaan kuat terhadap kelompok yang tidak sejalan
3. Pengaruh teori konspirasi terhadap bidang kesehatan dan farmasi
4. Teori konspirasi memberi pengaruh yang kuat terhadap sikap politik
5. Mempengaruhi kinerja sumber daya manusia ditempatnya bekerja

Dalam konteks politik, berdasarkan teori konspirasi, suatu negara dapat menyusun rencana secara sistematis dan rahasia dalam mempraktikkan kebijakannya baik dalam politik regional maupun politik internasional dalam menghancurkan tatanan pemerintahan negara lain untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Perilaku destruktif ini dapat kita lihat pada negara Amerika Serikat yang memainkan politik standar ganda dalam mendorong demokratisasi di negara-negara Timur Tengah khususnya pada negara Mesir dan Suriah.

## TIMUR TENGAH

Penamaan Timur Tengah pada wilayah ini tidak didasarkan secara letak geografisnya. Sejarawan ilmu tentang kelautan A.T. Mahan memperkenalkan istilah Timur Tengah pada awal abad ke-20 karena wilayah ini ketika dilihat dari Eropa tidak dapat dikatakan sebagai Timur Dekat ataupun Timur Jauh. Timur Tengah dikenal di Amerika Serikat dan Eropa ketika Inggris dan markas besar tentara sekutu didirikan di kairo yang terkenal dengan sebutan “Markas Besar di Timur Tengah”.

Timur Tengah memiliki posisi strategis dilihat dari geografisnya yang merupakan pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Koneksi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada laut dan komunikasi udara, dan wilayah ini terdapat banyak

laut diantaranya laut kaspia, laut hitam, laut atlantik, laut indian, laut merah dan laut mediterania. Kekuatan laut atau *sea power* mempunyai peranan penting dalam strategi internasional menurut A.T. Mahan. Di sisi lain yang menjadikan kehadiran Timur Tengah sangat penting adalah karena wilayah ini adalah penghasil minyak untuk cadangan minyak dunia. Tak heran jika banyak negara-negara di dunia yang ingin menguasai Timur Tengah untuk kepentingan politik dan ekonominya (Sahide, 2017, 2019).

Untuk bisa menundukkan dan menguasai Timur Tengah, dibuatlah konspirasi demokratisasi oleh pihak Asing terutama Amerika Serikat. Dengan “berkedok” penegakkan demokrasi dan menolak pemerintahan otoritarianisme, tujuan dari Amerika adalah para pemimpin yang di usung dalam sistem demokrasi tersebut tunduk dan patuh pada kehendak Amerika, terus menjalin koalisi, mengadopsi sistem ekonomi kapitalis dan selanjutnya untuk mengukuhkan kepentingan hegemoninya di wilayah tersebut, serta berkomitmen dalam perjanjian damai dengan Israel.

Revolusi yang terjadi di negara Mesir dan Suriah tidak terlepas dari intervensi Asing, terutama Amerika Serikat. Dalam proses demokratisasi di kedua negara tersebut, intervensi Asing dirasakan sangat berbeda. Amerika Serikat, dalam hal ini memainkan politik standar ganda, di satu sisi Amerika begitu aktif mendorong demokratisasi apabila dilihat akan mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik nasionalnya, yaitu untuk memperluas pengaruhnya dan mempertahankannya walaupun harus dengan cara menggulingkan pemerintahan yang sah. Di sisi lain Amerika justru berteman baik dan bekerja sama dengan para penguasa otoriter dan ikut mempertahankan kekuasaannya jika dinilai akan menjaga pengaruhnya dan kepentingannya di kawasan Timur Tengah (Sahide, 2017, 2019).

#### **POLITIK AMERIKA SERIKAT DI MESIR**

Politik standar ganda yang diperankan oleh Amerika Serikat dapat kita lihat pada revolusi yang terjadi di negara Mesir dan Suriah. Terdapat perbedaan sikap dari Amerika dalam menanggapi revolusi yang terjadi di kedua negara tersebut. Di Mesir, Amerika sangat aktif dalam mengawal peralihan kekuasaan yang sedang di pegang oleh Husni Mubarak. Mantan Presiden Barack Obama langsung berbicara kepada Husni Mubarak menggunakan jaringan telepon yang memberi sinyal untuk segera meninggalkan kursi kepresidenan dengan damai sehingga masa transisi tidak diwarnai keributan dan berjalan secara aman (Stacher, 2011).

Di mata Amerika, Mesir merupakan mitra Amerika yang setia sudah cukup lama. Dalam revolusi Mesir, hadirnya Amerika bukan sebagai agitator bagi Husni Mubarak. Ketika kekuasaan Husni Mubarak berada di akhir-akhir jabatannya, Amerika bersikap aktif dan secara tidak langsung meminta Husni Mubarak segera turun dari jabatannya. Kekuasaan Mubarak yang sebentar lagi runtuh, menurut Amerika Serikat harus dilaksanakan peralihannya secara damai dan mempunyai makna dan itu tidak boleh ditunda lagi demi meredakan kemarahan publik yang semakin intens (Sahide, 2017). Bagi Amerika pergantian

kepemimpinan dari satu penguasa ke penguasa berikutnya merupakan hal yang biasa, karena siapapun penguasanya yang terpenting bagi Amerika adalah tunduk dan patuh terhadap kepentingannya di kawasan tersebut. Selama pemimpin itu loyal dan mau menjalin tali persahabatan dengan Amerika dan tidak mengganggu kepentingan politik nasionalnya, gaya kepemimpinan apapun yang di anutnya termasuk kepemimpinan yang totaliter, Amerika akan tetap bersikap lunak dan mendukungnya.

Dunia Arab, atau lebih dikenal dengan Timur Tengah, sangat menggiurkan bagi Barat, terutama Amerika Serikat, karena merupakan negara-negara sumber penghasil minyak. Oleh karena itu tidak heran jika Amerika hadir dalam setiap pergolakan politik yang terjadi di kawasan tersebut. Letak geografis Mesir yang cukup strategis dan pemerintahannya yang loyal dengan Amerika harus tetap dijaga dan menjadi kawan baik bagi Amerika dalam mengamankan kepentingan nasionalnya.

Konsumsi Amerika terhadap minyak sangat begitu besar. Sejak tahun 1965 hingga tahun 2019 rata-rata konsumsi minyak Amerika sebesar 17,634.630 Barrel/hari. Persediaan minyak yang berada di Timur Tengah misalnya saja yang terdapat di Teluk Persia akan sangat membantu Amerika dalam kelangsungannya sebagai negara. Maka dalam hal ini Amerika harus mengamankan Terusan Suez dan itu artinya harus menjadikan Mesir sebagai mitra setia untuk memudahkan misinya mengangkut kebutuhan minyaknya dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz dan menyebrangi Terusan Suez untuk meminimalisir biaya transportasi dan akomodasi dalam mengimpor minyak juga optimalisasi waktu yang lebih cepat sampai melalui jalur ini tanpa harus mengelilingi benua Afrika yang akan memakan waktu yang cukup lama, dan pembengkakan biaya yang begitu besar dan tentunya akan berdampak pada ekonomi Amerika itu sendiri.

## **POLITIK AMERIKA SERIKAT DI SURIAH**

Suriah berbeda dengan Mesir, proses demokratisasi yang terjadi di Suriah sarat intervensi Asing yang mempersenjatai kelompok oposisi yang bertujuan untuk meruntuhkan kepemimpinan Bashar Al-Assad (HINNEBUSCH, 2012). Untuk menggulingkan kepemimpinan Bashar Al-Assad Amerika memanfaatkan kekuatan politik Liga Arab yang dijadikannya sebagai alat untuk mencapai agenda Amerika yang besar di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena pembubaran secara mendadak tim pemantau di Suriah oleh Liga Arab dan internasionalisasi kasus di Suriah terus di upayakan. Liga Arab yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di negara-negara Arab tanpa melibatkan pihak Asing, justru terus melibatkan keberadaan Asing diantara mereka untuk menyelesaikan kasus Suriah. Dengan adanya intervensi Asing ini tidak membantu terselesaikannya masalah, akan tetapi justru memperkeruh suasana yang ada (Burdah, 2014).

Suriah merupakan salah satu negara Timur Tengah penghasil minyak, dan merupakan sektor penyumbang penting dalam penghasilan negara. Cadangan minyak yang dimiliki

Suriah walaupun tidak sebanyak negara-negara lainnya yang berada di Timur Tengah, tetap memiliki pesona bagi negara-negara Barat untuk menguasai ladang minyak di sana. Suriah diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 2,5 milyar Barel. Angka ini cukup menggiurkan bagi Amerika Serikat untuk menguasai ladang minyak di Suriah.

Mengingat bahwa Bashar Al-Assad merupakan pemimpin yang anti-Amerika, maka kepentingan Amerika akan terganggu dan terhalangi dalam menguasai minyak Suriah. Senjata andalan Amerika pun dilancarkan dengan mendorong dan mendukung kelompok oposisi untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan yang otoriter menjadi sistem demokratis yang pro-rakyat. Melalui proyek demokratisasi, Amerika mulai mengintervensi politik dalam negeri Suriah, mengancam dengan keras penggunaan kekerasan terhadap para demonstran, dan mengingatkan untuk menghormati kebebasan berpendapat warga negara sebagai hak universal yang tidak boleh di halangi. Amerika pun mengeluarkan sejumlah kebijakan berkenaan dengan Suriah, diantaranya menyerukan supaya Bashar Al-Assad mundur dari pemerintahan, menutup Kedutaan Besarnya dan menarik Duta Besarnya Robert Ford dari Suriah, membekukan aset yang dimiliki oleh beberapa tokoh Suriah dan menutup akses ke sistem keuangan Amerika Serikat (Kuncahyono, 2013). Proyek demokratisasi yang dimainkan Amerika, sesungguhnya menginginkan kejatuhan pemimpin yang menghalangi kepentingannya, dan mengangkat para pemimpin yang loyal dan mau bekerjasama dengan Amerika.

Di sisi lain, Amerika juga memandang bahwa Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al-Assad merupakan penghalang utama upaya Amerika untuk menstabilkan kawasan Timur Tengah. Suriah dianggap sebagai penghalang dari upaya Amerika untuk menyelesaikan konflik antara Arab dan Israel (Sahide, 2019). Keberadaan Israel sangat penting bagi Amerika Serikat. Israel merupakan perwakilan dari kekuatan politik Asing untuk menstabilkan hegemoninya di Timur Tengah. Amerika menyadari bahwa rezim Al-Assad harus segera ditumbangkan sebelum semuanya terlambat, karena jikalau kekuatan Suriah bergabung dengan kelompok lain yang anti-Amerika, yaitu Iran, Gerakan Hizbullah, Gerakan Hamas dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, maka keberadaan Israel akan terkepung dan tidak dapat lagi menjadi perwakilan kekuatan Asing, dan itu artinya kepentingan nasional Amerika akan terganggu terutama penguasaan sumber daya minyak yang menjadi sumber energi pokok dalam memenuhi kebutuhan negaranya (Tamburaka, 2011).

Demokratisasi yang diserukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Arab yang berada di Timur Tengah mempunyai agenda besar di belakangnya. Dan politik standar ganda yang digunakan oleh Amerika terhadap Mesir dan Suriah membuktikan bahwa demokrasi bukanlah tujuan utama dari Amerika dalam keterlibatannya di kawasan Timur Tengah, melainkan semata-mata hanya untuk menancapkan pengaruhnya dan mencapai kepentingannya di kawasan tersebut (Kaukab, 2021). Beberapa kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah diantaranya adalah: *Pertama*, menguasai sumber daya yang ada di Timur Tengah dan menjaganya agar tidak jatuh ke pihak lain. *Kedua*, mengamankan penyaluran

sumber daya yang digunakan untuk kepentingan industri dan militer. *Ketiga*, mensuplai sekutu-sekutu Amerika dengan sumber daya yang diperolehnya dari Timur Tengah dan memperkuat ekonomi dan militer. *Keempat*, menjamin keamanan investasi sehingga meraup keuntungan secara kontinu dari bidang usaha yang dibangun Amerika di Timur Tengah. *Kelima*, mempertahankan kredibilitas Amerika di kawasan Timur Tengah dengan menepati komitmennya di kawasan tersebut. *Keenam*, menjaga kepentingan udara dan laut, seperti meneruskan hak transit untuk pesawat terbang dan kapal laut (Rais, 1988).

Dari uraian di atas kita dapat melihat dengan jelas bahwa perilaku destruktif yang dilakukan oleh suatu negara menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada perilaku destruktif yang dilakukan secara individu karena dikerjakan secara terstruktur, sistematis dan masif. Perilaku ini sangat berbahaya, karena dapat merusak tatanan kehidupan yang luas bahkan dapat meruntuhkan suatu negara dan terus ditimpa oleh problem yang tidak ada ujungnya. Dengan peristiwa yang menimpa Mesir dan Suriah ini, apakah negara-negara Timur Tengah menyadari akan bahayanya perilaku destruktif yang dilancarkan melalui politik standar gandanya Amerika Serikat yang bersembunyi dibalik proyek demokratisasi sistem pemerintahan? Bagaimana caranya negara-negara Timur Tengah bisa lepas dari perilaku destruktif ini yang akan merugikan rakyatnya?

## KESIMPULAN

Demokratisasi yang diserukan Amerika Serikat terhadap negara-negara Timur Tengah merupakan agenda untuk mencapai tujuannya dan mewujudkan keinginannya dalam mendominasi dan menguasai sumber daya yang ada di Timur Tengah, terutama masalah eksplorasi minyak. Hal ini dapat kita lihat dari politik standar ganda yang dimainkan oleh Amerika dalam proses peralihan kekuasaan yang terjadi di Mesir dan Suriah. Di Mesir, Amerika berteman baik dengan Husni Mubarak, kendati pemerintahan yang dipimpinnya bergaya otoriter, namun sikap Amerika terhadap Mesir sangat lunak dan bahkan Mesir dianggap sebagai mitra yang harus dijaga. Bahkan ketika rakyat mesir menginginkan perubahan dan revolusi tidak dapat dihindarkan, Amerika berperan sangat aktif dalam mengawal kemunduran Husni Mubarak. Amerika menganggap bahwa Husni Mubarak adalah kawan baik yang harus dibantu dalam proses kemundurannya dari tampuk kepemimpinan. Kerja sama yang terus dijaga dengan Mesir tidak lain adalah untuk kepentingan Amerika Serikat untuk melindungi wilayah Israel yang merupakan perwakilan dari kekuatan Asing di Timur Tengah dari serangan negara-negara Arab dengan memblokade jalur Gaza. Di sisi lain Amerika harus mengamankan Terusan Suez sebagai jalur alternatif yang ditempuh kapal-kapal pengangkut minyak yang berasal dari Teluk Persia untuk menghemat biaya transportasi dan akomodasi serta optimalisasi waktu yang lebih cepat dibanding dengan harus mengelilingi benua Afrika yang sangat jauh.

Sementara revolusi yang terjadi di Suriah, Amerika justru mempersenjatai kelompok oposisi dalam melakukan peralihan kekuasaan yang dianggap otoriter ke dalam sistem

demokratis dan menyerukan kemunduran Bashar Al-Assad dari kepemimpinannya dengan segera. Hal ini disebabkan karena pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al-Assad dianggap selalu menghalangi kepentingan Amerika untuk menstabilkan politik nasionalnya yang di tancapkan di Timur Tengah, dan berbahaya terhadap keberadaan Israel dimana Suriah berkoalisi dengan Iran, Hizbullah, Hamas dan Ikhwanul Muslimin di mesir yang sewaktu-waktu bisa mengepung dan melumpuhkan kekuatan Israel bersama-sama jika Suriah terlambat dikendalikan. Demokratisasi Suriah dan kemunduran Bashar Al-Assad terus diserukan Amerika dengan alasan kemanusiaan yang kebebasannya dikekang oleh pemerintahan yang diktator adalah sebagai alat untuk Amerika menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad yang anti-Amerika dan menggantinya dengan penguasa yang pro-Amerika, sehingga Amerika bisa dengan mudah menguasai ladang minyak yang ada di Suriah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, T. (2018). Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2).  
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>
- Angrist, M. P. (2013). Understanding the Success of Mass Civic Protest in Tunisia. *Middle East Journal*, 67(4), 547–564. <http://www.jstor.org/stable/43698075>
- Brooks, S. M., & Kurtz, M. J. (2016). Oil and Democracy: Endogenous Natural Resources and the Political “Resource Curse.” *International Organization*, 70(2), 279–311.  
<https://doi.org/10.1017/S0020818316000072>
- Burdah, I. (2014). *Islam Kontemporer, Revolusi, dan Demokrasi*. Intrans Publishing.
- Darraj, S. M. (2005). *Bashar Al-Assad, Major World Leaders*. Chealsea House Publishers.
- Douglas, K. M., Uscinski, J. E., Sutton, R. M., Cichocka, A., Nefes, T., Ang, C. S., & Deravi, F. (2019). Understanding Conspiracy Theories. *Political Psychology*, 40(S1), 3–35.  
<https://doi.org/10.1111/pops.12568>
- HINNEBUSCH, R. (2012). Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution? *International Affairs*, 88(1), 95–113. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01059.x>
- House, F., & Republican, T. (2011). *U . S . Groups Helped Nurture Arab Uprisings*. Order A Journal On The Theory Of Ordered Sets And Its Applications.
- Kaukab, M. E. (2021). A New Perspective on Middle-East Democracy. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v4i1.1793>
- Kuncahyono, T. (2013). *Musim Semi di Suriah*. Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi/ Moleong*. Remaja Rosdakarya.
- Rais, A. (1988). *Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah*. PAU-SS UGM.
- Reid, S. A. (2022). *conspiracy theory*. Encyclopedia Britannica.  
<https://www.britannica.com/topic/conspiracy-theory>
- Sahide, A. (2017). *Gejolak Politik Timur Tengah: Dinamika, Konflik dan Harapan*. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Sahide, A. (2019). *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*. Penerbit Buku

Kompas.

Sampoerna University. (2022). *Teori Konspirasi: Pengertian, Jenis, Tujuan dan Contoh*.  
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/>.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teori-konspirasi/>

Setiawan, A. (2015). Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 67–77.  
<https://doi.org/10.18196/hi.2015.0067.67-77>

Sitorus, T. H. (2018). *Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik Suriah 2011-2013*. Universitas Sumatera Utara.

Stacher, J. (2011). *Egypt's Democratic Mirage: How Cairo's Authoritarian Regime Is Adapting to Preserve Itself*. [www.Foreignaffairs.Com](http://www.foreignaffairs.com). <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-02-07/egypts-democratic-mirage>

Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Penerbit NARASI.

Wahyudi, H. (2016). *Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kudeta Mesir 2013*. Universitas Gadjah Mada.

**Copyright (c) 2022 Yogi Fery Hidayat**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).